

ABSTRAK

Parlemen yang dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat, sejatinya merupakan aspek kelembagaan negara yang secara filosofis berkedudukan secara langsung sebagai aktualisasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Atas dasar yang demikian sebagai aspek kelembagaan negara yang berkedudukan mewujudkan kedaulatan rakyat, maka sistem yang berjalan di dalamnya juga haruslah didasarkan pada prinsip tersebut, dalam hal ini dipandang bahwa pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan partainya masing-masing atau yang lazim disebut sebagai sistem fraksi Partai Politik merupakan suatu sistem yang bertentangan dengan demokrasi, hal ini karena dalam konteks realitas keberadaan fraksi telah menimbulkan legislator lebih tendensius untuk merepresentasikan sikap partai dibandingkan dengan konstituen yang memilihnya, selain itu keberadaan fraksi lebih difungsikan sebagai instrument partai politik untuk mendoktrinasi legislator.

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan fraksi partai politik dalam sistem kelembagaan parlemen telah mengalami disorientasi, yang mana pada awalnya keberadaan fraksi dalam parlemen adalah untuk mewujudkan konsensus ideologis dalam kebijakan hukum yang dihasilkan, mengingat di masa tersebut partai masing memegang teguh ideologinya masing-masing, namun dengan fakta bahwa dewasa ini partai politik telah mengalami degradasi ideologi dan hanya bersandar pada kepentingan politik pragmatis belaka, maka keberadaan fraksi juga hanya sekedar sebagai instrument konsensus kepentingan pragmatis, sehingga diperlukan adanya penghapusan sistem fraksi partai politik untuk mewujudkan Dewan Perwakilan rakyat sebagai parlemen yang demokratis, serta atas penghapusan tersebut diperlukan beberapa konstruksi mekanisme dalam kelembagaan untuk mencegah adanya kekosongan sistem dan mekanisme.

Kata kunci: Fraksi; Rekonstruksi; Politik.

ABSTRACT

Parliament, which in the Indonesian context is embodied by the Dewan Perwakilan Rakyat, is essentially an institutional aspect of the state that, philosophically speaking, directly serves as the embodiment of the principles of democracy and popular sovereignty. On this basis, as an institutional aspect of the state tasked with realizing popular sovereignty, the system operating within it must also be grounded in that principle. In this regard, it is argued that the grouping of House of Representatives members according to their respective parties commonly referred to as the political party faction system constitutes a system that contradicts democracy. This is because, in the context of reality, the existence of factions has led legislators to be more inclined to represent their party's stance rather than that of the constituents who elected them; furthermore, the existence of factions is primarily utilized as a tool by political parties to indoctrinate legislators.

The type of research employed here is normative or doctrinal legal research, utilizing a statutory approach and a conceptual approach.

The findings of this study indicate that the existence of political party factions within the parliamentary institutional system has become misaligned. Originally, the purpose of factions in parliament was to achieve ideological consensus in the legal policies produced, given that at that time each party firmly adhered to its own ideology; however, given that political parties today have experienced ideological degradation and rely solely on purely pragmatic political interests, the existence of factions has also become merely an instrument for pragmatic consensus, therefore, the abolition of the political party faction system is necessary to realize the People's Representative Council as a democratic parliament; furthermore, following such abolition, several institutional mechanisms must be established to prevent systemic and procedural vacuums.

Keywords: Factions; Reconstruction; Politics.